

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang

Pemilihan Umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi di mana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun ke depan. Pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan sudah cukup mewakili partisipasi dan merupakan aspirasi masyarakat. Didasari bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat berkesinambungan.

Pemilu merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah. Adapun tujuan berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi Negara

seperti halnya pemilihan umum. Karena itu, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Sebuah pembelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu. Hak suara masyarakat sangat menentukan arah dan masa depan sebuah Negara yang menganut sebuah demokrasi, dimana seorang pemimpin merupakan perwujudan aspirasi dari masyarakat.

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan kedalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada dasarnya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Bentuk partisipasi politik beranekaragam, akan tetapi pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Pemberian suara terdapat di hampir semua system politik, baik yang demokratis maupun otoriter. Pemilihan Umum di negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih kepada alat bagi penguasa dari pada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu.

Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara, kota terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Angka laju pertumbuhan penduduk Kota Medan menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 sebesar 2.210.624 jiwa. Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan

penduduk tidak tetap mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk yang bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari. Kota Medan mempunyai beragam etnis dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa, Melayu, dan Minangkabau. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari adanya masjid, gereja, dan vihara yang banyak tersebar di seluruh sudut kota. Sejalan dengan itu praktik politik identitas lebih dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan aktor-aktor lokal yang di artikulaskan melalui pemekaran daerah (Maarif, 2012; Sjaff, 2014 ).

Berbagai studi menjelaskan, bahwa desentralisasi adalah faktor penentu timbulnya politik identitas. Dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada daerah di era reformasi membuat semakin mudahnya posisi aktor-aktor lokal meraih kekuasaan di arena politik lokal. Hasil analisis Von Beyme (1996:122 ) bahwa kemunculan politik etnis diawali dengan tumbuhnya kesadaran yang mengidentikan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok tertentu. Kesadaran ini memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan.

Menurut pandangan Bourdieu (1980), dominasi praktik politik tidak hanya mengenai ekonomi saja melainkan adanya dominasi etnik, budaya politik, dan gender di berbagai arena. Arena diartikan wilayah dinamis yang terdapat pertarungan-pertarungan untuk mendapat posisi tertentu. Modal dalam pandangan Bourdieu bukan hanya merujuk pada kepemilikan modal ekonomi semata, melainkan meliputi modal sosial, modal simbolik, modal budaya dan modal ekonomi. Setiap kelompok etnik memiliki paguyuban sosial yang mengatasnamakan etnisitasnya masing-masing seperti PSMTI (Paguyuban Sosial

Marga Tionghoa Indonesia), IKMS (Ikatan Keluarga Minang Saiyo), Ikatan Masyarakat Melayu, dan lainnya.

Ada yang menarik di Kota Medan sendiri mengenai proses Pemilu, apalagi Pemilu di tahun 2019 yang diikuti pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dilakukan secara bersamaan. Masyarakat pun seakan terbelah menjadi dua kubu. Fanatisme terhadap dukungan salah satu calon juga terkandung membutuhkan publik. Bahkan, hingga usai pencoblosan, tensinya masih terasa. Pemilihan Umum serentak 17 April 2019 meninggalkan beberapa catatan penting. Pemilu kali ini dianggap yang terberat dalam sejarah demokrasi di Indonesia dalam menentukan pemimpin.

Peneliti memfokuskan kajiannya pada Pemilihan Legislatif. Di lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai mayoritas penduduk ialah etnis Minangkabau meskipun ada beberapa etnis lainnya seperti Jawa, dan Batak Toba. Masyarakat Minangkabau dalam praktik politik menghilangkan unsur kebudayaan. Dalam pertarungan politik tahun 2019, masyarakat Minangkabau malah menentukan hak politiknya diluar etnisnya. Hal inilah yang membuat unsur kebudayaan Minangkabau terkikis. Tentu ada faktor yang membuat masyarakat Minang memilih pasangan Calon Legislatif diluar etnis Minang untuk Lima tahun ke depan.

Untuk konsep kepemimpinan politik, masyarakat Minangkabau tidak memosisikan pemimpinnya sebagai orang yang dihormati secara berlebihan. Ketika pemimpin itu tidak amanah atas jabatannya bisa disanggah ataupun bisa diganti melalui dewan adat. Menurut Prof. Hamdi menjelaskan bahwa filosofi

Minangkabau yang menempatkan pemimpinnya “ditinggikan seranting didahulukan selangkah”. Dengan Filosofi seperti ini masyarakat Minangkabau banyak melahirkan pemimpin sejati dan rendah hati. Dalam konteks politik, pluralisme masyarakat yang didasarkan pada etnisitas memungkinkan kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga tercegah terjadinya suatu kelompok mendominasi kelompok lainnya. Dengan demikian, pluralisme dapat menimbulkan berkembangnya politik aliran terutama pada tempat yang majemuk dan multikultural, semisalnya di lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai bervariasi etnis tetapi yang mendominasi ialah etnis Minangkabau. Politik aliran sering terjadi pada politisasi agama yang menunjuk pada kebangkitan agama sebagai kekuatan politik dari pada etnik.

Dalam konteks ini, agama dapat saja membentuk kekuatan melalui partai politik yang bersaing pada kontestasi pemilu. Sedangkan pada kenyataan yang sama tidak terjadi pada etnik, yakni tidak munculnya partai politik yang berbasis etnik. Meskipun politik etnik dapat memainkan peranannya ditingkat lokal terutama pada daerah-daerah yang seragam pada etniknya. Lingkungan 20 Kelurahan Binjai kecamatan Medan Denai yang di dominasi etnis Minangkabau yang mempunyai kelompok paguyuban sendiri yakni IKMS (Ikatan Keluarga Minang Saiyo ). Masyarakat Minang memberikan hak politiknya kepada Bapak Ihwan Ritonga yang beretnis Batak Toba pada Pemilihan Umum 2019. Tentu ada hal yang bisa dicermati mengapa masyarakat Minang memberikan Partisipasi politiknya kepada Bapak Ihwan Ritonga yang beretnis Batak Toba.

Pada dasarnya di lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai masyarakat selain Minangkabau tidak dominan banyak. Tetapi etnis diluar Minang mampu menarik perhatian masyarakat Minang dalam partisipasi politik. Di lingkungan 20 masyarakat sangat berperan mengikuti aktivitas pesta demokrasi baik golongan muda yang baru bisa memilih ataupun golongan tua yang tetap melanjutkan pemilihannya. Golongan muda turut berperan besar dalam pesta politik kali ini dengan berperan menyuarakan dan mensosialisasikan tentang pemilu 2019. Golongan Muda cenderung menentukan hak politiknya kepada etnis Batak tersebut. Calon Legislatif yang beretnis Batak Bapak Ihwan Ritongan mempunyai peran dan andil besar di lingkungan tersebut. Dengan peran dan andilnya Caleg tersebut sehingga dapat menarik perhatian masyarakat minang untuk memilih beliau dalam pertandingan Pemilu di tahun 2019.

Kesadaran politik masyarakat menjadi sangat penting karena hal inilah merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi yang ideal. Kesadaran politik yang dimaksud di sini merupakan sebagai daya tangkap masyarakat terhadap masalah yang mampu memberikan dorongan dan motivasi dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik politik, terlebih dahulu harus meningkatkan kesadaran dalam berpolitik. Menurut Abdullah (2011:53 ) satu-satunya hak politik yang masih dimiliki oleh rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Terbentuknya kesadaran politik dalam masyarakat pada hakekatnya dikarenakan setiap individu mengalami sosialisasi politik dan individu mendapatkan suatu keyakinan dalam

kehidupan berpolitik. Penelitian ini akan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam menentukan hak politiknya dan penyebab mengapa masyarakat memilih Calon Legislatif yang beretnis Batak Toba dalam pertandingan politik di tahun 2019 di Lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yang menjadi konsentrasi kajian ini yakni :

1. Apa yang memotivasi masyarakat Minangkabau menentukan hak pilihnya diluar etnis Minangkabau dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai ?
2. Bagaimana motivasi memilih masyarakat Minangkabau terhadap Calon Legislatif Minangkabau dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai melalui kajian ini adalah sebagaimana dirumuskan di bawah ini, yaitu:

1. Mengetahui apa yang memotivasi Masyarakat Minangkabau untuk menentukan hak pilihnya diluar etnis Minangkabau dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
2. Mengetahui apa yang memotivasi masyarakat Minangkabau terhadap Calon Legislatif Minangkabau dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Tercapainya tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberi manfaat pada kajian Antropologi terkhususnya pada bagian Budaya Politik, hal ini dikarenakan adanya pola perilaku di dalam masyarakat untuk menentukan hak politiknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga tambahan pada bahasan mengenai teori partisipasi politik. Demikian pula mampu mengembangkan konsep dan memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu budaya politik di tengah masyarakat.

Secara praktis, kajian ini memberi manfaat pada masyarakat, penggiat politik, penggiat budaya dan perencana pendidikan. Bagi masyarakat, kajian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang motivasi memilih masyarakat sebagai salah satu keinginan manusia dalam menentukan hak pilihnya. Kajian ini memberikan informasi dan kontribusi yang berkaitan dengan bagaimana mengetahui cara masyarakat dalam memilih pasangan calon politiknya, serta masyarakat mampu berperan aktif dalam mendukung peningkatan partisipasi politik di tengah masyarakat.